

# PELUANG MEMBANGUN PEREKONOMIAN NASIONAL DENGAN PERBAIKAN SISTEM PEMBIAYAAN BAGI USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM)

**Chandra Utama**

Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan

## **Abstract**

*Small and medium enterprises (SMEs) have an important role in economy, not only they employ a lot of workers but also contribute to Gross Domestic products (GDP). The SMEs contribute more than 60 percent of GDP (40 persen from small enterprises (SEs)). More than 99 percent of enterprises in Indonesia are SMEs and more than 96 percent of worker are employed by them (more than 91 percent work in SEs). Although SMEs are very important for the Indonesian economy, they still have problem to have accessing fund. The SEs invest only 1,5 million rupiahs in average (only 0.0078 and 0.00005 times the average investment of medium (MEs) and big enterprises (BEs) each year) and the MEs invest 855.88 million rupiahs in average (nearly 0,03 times the average investment of BE each year). The data shows that investment for each SE is too small than investment of MEs and BEs. On the other hand the return of investment in SE are more than twice than ME and BE. Although the SMEs contribute 60 percent of total GDP, they only invest 43 percent of total investment every year. The Kredit Usaha Kecil (KUK) that served by commercial Banks for SMEs only contribute 37 percent to total investment of SMEs or 16 percent to total investment. It is proper SMEs invest more than current their investment because they contribute to GDP more than BEs. The intermediation institution (bank) should improve they role in SMEs funding. The development of intermediary system that serve easy funding for SMEs especially SEs is a potential way to increase the economic growth and better distribution of income.*

Kata kunci: Usaha Kecil, UKM, Pembiayaan.

## **I. Pendahuluan**

Kemakmuran suatu negara bersumber dari jumlah output perekonomian yang besar dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai pertumbuhan output yang tinggi dibutuhkan perkembangan dunia usaha yang memproduksi barang dan jasa.

Banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dunia usaha seperti sumberdaya manusia yang baik, pemasaran, sistem manajemen, aturan regulasi pemerintah dan sebagainya, dan tentu saja tidak kalah penting faktor modal atau pembiayaan.

Setiap kegiatan usaha, baik usaha besar maupun usaha kecil dan menengah membutuhkan pembiayaan yang memadai untuk dapat berjalan dan berkembang. Dalam penyediaan dana tersebut, peran lembaga intermediasi sangat diperlukan untuk menghubungkan pemilik dana dan dunia usaha. Perbankan sebagai pemegang dana terbesar dalam perekonomian memegang peran yang sangat vital dalam penyediaan dana bagi dunia usaha. Selain perbankan lembaga keuangan non bank lain seperti koperasi, lembaga simpan pinjam, dan lain sebagainya juga memiliki peran penting dalam menghimpun dana masyarakat yang dapat digunakan untuk investasi dan pembiayaan dunia usaha.

Berbeda dengan usaha besar, kekurangan modal dan sulitnya akses mendapatkan dana pembiayaan merupakan masalah klasik bagi usaha kecil dan menengah (UKM). Semakin kecil skala usaha maka pada umumnya semakin sulit unit usaha memperoleh akses dana dari perbankan. Atau dengan kata lain usaha menengah lebih sulit mendapat akses dibandingkan usaha besar, usaha kecil lebih sulit dibandingkan usaha menengah, dan usaha mikro tentu saja paling sulit memperoleh pendanaan. Muncul pertanyaan mengapa usaha menengah, kecil dan mikro mengalami kesulitan dana? Apakah benar akses ke sumber dana semakin sulit bagi usaha dengan skala yang semakin kecil? Faktor apa saja yang menyebabkan usaha dengan skala yang semakin kecil semakin sulit mendapatkan akses pembiayaan, karena usaha tersebut tidak mempunyai prospek atautkah karena prosedur yang ada tidak mendukung perkembangan sistem pembiayaan usaha kecil dan mikro.

## **II. Definisi skala usaha**

Skala usaha dapat didefinisikan berdasarkan nilai asset dan nilai penjualan, seperti dalam beberapa definisi berikut:

Usaha Mikro (UM) adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia, secara individu atau tergabung dalam Koperasi dan memiliki hasil penjualan secara individu paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per tahun sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan No.12/PMK.06/2005 tanggal 14 Februari 2005 tentang Pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil.

Usaha Kecil (UK) adalah usaha yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) usaha produktif milik Warga Negara Indonesia yang berbentuk badan usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbentuk hukum, atau badan usaha berbadan hukum termasuk koperasi;

- 2) bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar; dan
- 3) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan maksimum Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per tahun; sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.9 tahun 1995.

Usaha Menengah (UM) adalah usaha produktif yang berskala menengah dan memenuhi kriteria kekayaan bersih lebih besar dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) di luar tanah dan bangunan tempat usaha atau yang memiliki hasil penjualan maksimum Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) per tahun sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia No.10 tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah.

Sedangkan usaha besar (UB) tentu saja usaha yang kekayaan dan penjualannya lebih besar dibandingkan usaha menengah.

### III. Peran Penting UKM dalam perekonomian

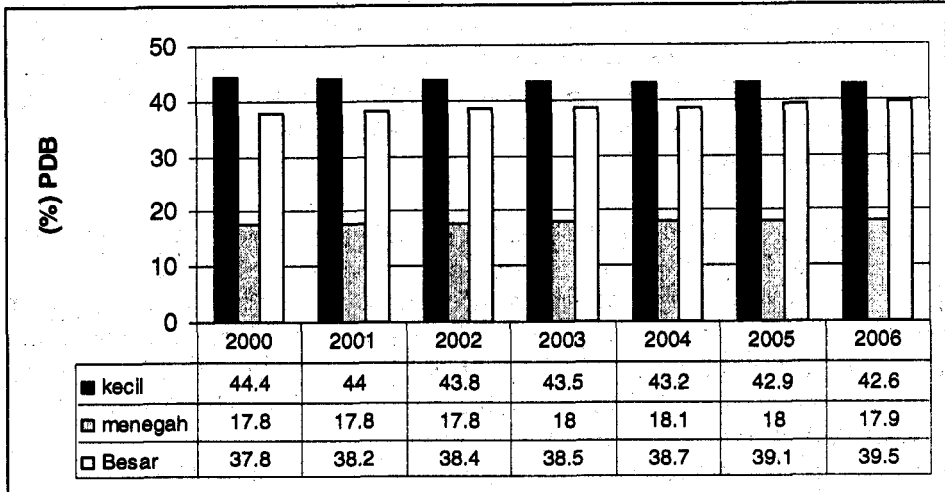
Pada tabel 1 dapat dilihat jumlah unit usaha kecil (UK), menengah (UM), dan besar (UB) di Indonesia dari tahun 2000 sampai 2006. Dari total unit usaha yang ada jumlah UK mendominasi sebesar 99,78 persen, disusul UM sebesar 0,2 persen dan UB sebesar 0,1 persen. Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa sebagian besar unit usaha yang ada adalah UK. Pembangunan UK, dan juga UM, tentu saja berdampak besar terhadap perekonomian.

**Tabel 1**  
**Persentase Unit Usaha Kecil, Menengah dan Besar Tahun 2000-2006**

		Persentase dari total usaha			
		Kecil	menengah	besar	Total
Tahun	2000	99,79	0,20	0,01	100
	2001	99,78	0,20	0,01	100
	2002	99,78	0,20	0,01	100
	2003	99,78	0,20	0,01	100
	2004	99,78	0,21	0,01	100
	2005	99,78	0,20	0,01	100
	2006	99,77	0,22	0,01	100
rata-rata		99,78	0,2	0,01	100

Sumber: Kementerian koperasi dan UKM, diolah

**Gambar 1**  
**Persentase Sumbangan UKM dan usaha Besar dalam PDB Non-migas**



Sumber: Departemen Koperasi dan UKM, diolah

Usaha kecil dan menengah (UKM) juga memegang peran penting dalam memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan domestik bruto. Pada gambar 1 dapat dilihat sejak tahun 2000 sampai 2006 rata-rata UK menyumbang 43,5 persen dari PDB non-migas, sedangkan UM dan UB memberikan sumbangan 17,9 dan 38,6 persen dari total PDB non-migas. Jadi dari data ini diketahui bahwa UKM menyumbang lebih dari 60 persen PDB non-migas.

**Tabel 2**  
**Persentase Penyerapan Tenaga Kerja**

tahun	Skala Usaha			Total
	kecil	menengah	Besar	
2000	91,23	5,19	3,58	100
2001	91,29	4,90	3,82	100
2002	91,44	4,83	3,73	100
2003	91,61	4,69	3,70	100
2004	91,41	4,82	3,77	100
2005	91,38	4,90	3,72	100
2006	91,14	5,05	3,82	100
Rata-rata	91,36	4,91	3,73	100

Sumber: Departemen Koperasi dan UKM, diolah

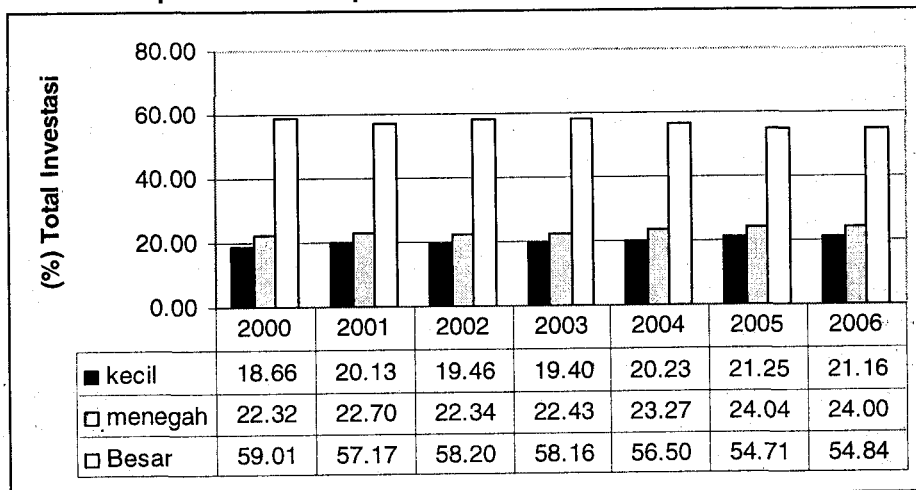
Selain memberikan kontribusi besar dalam PDB dan merupakan mayoritas usaha di Indonesia, UK memberikan lapangan kerja bagi sebagian besar tenaga kerja di Indonesia. Dari tabel 2 dapat dilihat peran usaha kecil terhadap penyerapan tenaga kerja selama kurun waktu 2000 sampai 2006 sangat besar. UK menyerap lebih dari 91 persen tenaga kerja. Artinya untuk kurun waktu ini, 9 dari 10 orang bekerja pada UK. Sedangkan jika ditambah UM, UKM mempekerjakan lebih dari 96 persen orang yang bekerja. Artinya dari 20 orang yang pekerja 19 orang bekerja di UKM.

Dari data yang telah disampaikan (dalam kurun waktu 2000-2006) diatas terlihat bahwa kontribusi UKM terhadap perekonomian, terutama dalam penyerapan tenaga kerja sangat penting. Dapat dilihat bahwa perkembangan UKM terutama UK sangat mungkin menyebabkan pertumbuhan ekonomi dan sekaligus pemerataan kesejahteraan. Suatu tantangan dalam pengembangan usaha kecil adalah jumlahnya yang sangat banyak yang memerlukan perhatian yang ekstra dalam membantu pengembangannya.

#### IV. Investasi UKM

Setiap usaha membutuhkan permodalan, baik untuk membiayai kegiatan sehari-hari maupun untuk investasi dalam bentuk ekspansi usaha atau penggantian peralatan yang usang. Pada gambar 2 berikut disampaikan persentase investasi yang dikeluarkan oleh UKM dan UB dibandingkan total investasi dunia usaha dalam perekonomian.

**Gambar 2**  
**Persentase Investasi Usaha Kecil, Menengah dan Besar dan Proporsi Terhadap Total Investasi Tahun 2000-2006**



Sumber: Departemen Koperasi dan UKM, diolah

Proporsi investasi pertahun UK cenderung meningkat mulai dari 18 persen pada tahun 2000 menjadi lebih dari 21 persen tahun 2006 dan begitu pula UM dari mulai dari 22 persen pada tahun 2000 menjadi lebih dari 24 persen tahun 2006. Namun demikian, apalagi bila dilihat dari besar investasi rata-rata per unit usaha, dibandingkan UM apalagi UB, investasi pada UK dapat dikatakan tidak ada artinya. Pada tabel 3 dapat dilihat rata-rata investasi per unit usaha.

**Tabel 3**  
**Investasi per Unit Usaha kecil, menengah, dan besar**  
**tahun 2000-2006 (juta rupiah)**

		Tahun			
		2000	2001	2002	2003
Unit usaha	Kecil	1,30	1,48	1,43	1,38
	menengah	781,21	823,66	807,99	794,65
	besar	28.688,27	28.396,88	29.191,18	27.628,74
		Tahun			
		2004	2005	2006	rata-rata
Unit usaha	Kecil	1,61	1,78	1,75	1,53
	menengah	887,74	986,08	909,83	855,88
	besar	29.985,63	31.584,68	30.801,26	29.468,09

Sumber: Departemen Koperasi dan UKM, diolah

Terlihat bahwa rata-rata investasi UK adalah 1,53 juta rupiah per unit usaha sedangkan untuk UM adalah 855,88 juta rupiah dan UB 29.468,09 juta per tahun. Berdasarkan data rata-rata investasi selama tahun 2000 sampai 2006 pada tabel 3 bila dihitung investasi usaha menengah dan besar rata-rata 559 dan 19.260 kali lebih besar dari investasi usaha kecil. sedangkan rata-rata investasi UB adalah 34 kali dari UM. Dapat dilihat bila dibandingkan skala usaha yang lebih besar maka UK melakukan investasi kurang dari 2/1000 kali UM padahal UM melakukan investasi hampir 3/100 kali UB.

Sekalipun per UK per tahun rata-ratanya hanya menggunakan investasi yang jauh dibawah UM dan UB namun dalam efisiensi penggunaan investasi justru UK memberikan pengembalian pada tahun berikutnya yang jauh lebih besar dibandingkan UM dan UB. Data pada tabel 4 diperoleh dengan membagi peningkatan PDB dengan jumlah investasi yang ditanamkan di UKM, dan UB pada periode tahun sebelumnya dengan alasan bahwa investasi untuk menjadi barang jadi membutuhkan waktu.

Pada tabel 4 dapat dilihat bahwa untuk tiap 1 juta rupiah investasi yang ditanamkan pada UK berdampak meningkatkan PDB pada periode selanjutnya sebesar rata-rata 477,6 ribu rupiah. Sedangkan untuk UM dan UB untuk tiap 1 juta rupiah investasi yang ditanamkan meningkatkan PDB pada periode selanjutnya sebesar rata-rata hampir 200 ribu rupiah dan 190 ribu rupiah.

**Tabel 4**  
**Persentase Rata-rata Pengembalian Investasi Pada Tahun Berikutnya**

		Tahun			
		2000	2001	2002	2003
Unit usaha	Kecil		41,65	43,91	50,79
	menengah		16,58	18,11	23,48
	besar		17,23	17,15	16,77
		Tahun			rata-rata
		2004	2005	2006	
Unit usaha	Kecil	52,08	53,79	44,35	47,76
	menengah	24,84	20,15	16,75	19,99
	besar	20,17	21,79	20,9	19

Sumber: Departemen Koperasi dan UKM, diolah

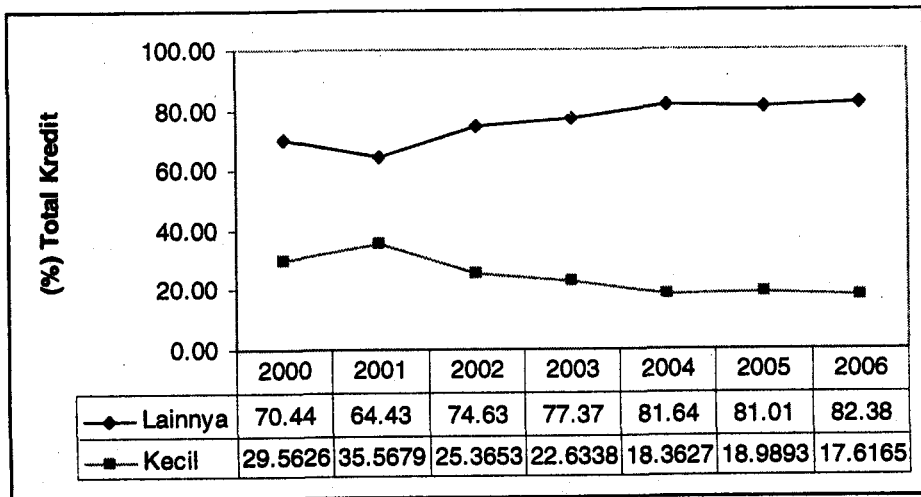
Berdasarkan tabel 3 dan tabel 4 dapat kita lihat bahwa UK masih memiliki permodalan yang sangat kecil sekalipun memberikan rata-rata pengembalian pada tahun berikutnya yang jauh lebih besar dibandingkan UM dan UB. Tentu ini merupakan suatu tanda tanya mengapa usaha yang memberikan pengembalian yang lebih besar justru memperoleh permodalan yang jauh lebih kecil.

#### **V. Penyaluran Kredit kepada UKM**

Salah satu sumber dana penting dalam investasi adalah dunia perbankan. Berikut disampaikan data persentase penyaluran dana perbankan dalam bentuk *kredit usaha kecil* yang diberikan kepada UKM bukan hanya kepada UK. Data pada gambar 3 merupakan data *posisi kredit usaha Kecil* dibagi *total posisi kredit perbankan*. Sedangkan data lainnya adalah data proporsi kredit perbankan yang bukan kredit usaha kecil dibandingkan total kredit perbankan.

Penyaluran *kredit usaha kecil* persentasenya sejak tahun 2000 sebesar hampir 30 persen dari total kredit menjadi hanya lebih dari 17 persen dari total kredit yang disalurkan perbankan, sekalipun dalam nilainya ada peningkatan dari 40.533 milyar rupiah pada Juli 2000 menjadi 103.574 milyar rupiah pada Juli 2006. Terlihat dari tabel 5 bahwa penyaluran kredit dari perbankan jauh lebih kecil persentasenya dibandingkan persentase investasi UKM yang 43 persen dari total investasi. Sekalipun UKM menyumbang 60 persen PDB namun mereka hanya melakukan investasi sebesar 43persen dari total investasi dan hanya 37 persennya didanai perbankan melalui KUK (lihat tabel 5). Berarti hanya 16 persen investasi yang dibiayai oleh KUK.

**Gambar 5**  
**Posisi Kredit Perbankan**



Sumber: Bank Indonesia

**Tabel 5**  
**Pengeluaran investasi dan kredit pembiayaan usaha kecil (KUK)**

Tahun	2000	2001	2002	2003
(%) KUK dibanding investasi UKM	0,362	0,419	0,366	0,414
Tahun	2004	2005	2006	Rata-rata
(%) KUK dibanding investasi UKM	0,333	0,353	0,319	0,367

Sumber: Kementerian Koperasi & UKM dan Bank Indonesia, diolah



Terlihat bahwa perlu adanya perbaikan peran perbankan dalam penyaluran dana kepada UKM. Dalam pidato sambutan penyerahan penghargaan produktifitas dan kualitas USAHA KECIL tahun 2005 bahkan presiden menyatakan seharusnya dana untuk USAHA KECIL (yang dimaksud UKM) adalah 60 persen sesuai sumbangannya terhadap PDB (Koran Tempo: 2005), namun nyatanya ?

Berdasar apa yang dikatakan presiden diatas, jika memang investasi UKM menjadi 60 persen dari total investasi (dengan asumsi investasi usaha besar tidak turun) maka investasi UKM harus meningkat menjadi 185,5 persen dari sekarang. Dan jika 85,5 persen peningkatan investasi UKM tersebut dibiayai oleh perbankan maka perbankan harus meningkatkan kredit untuk UKM menjadi 367 persen atau menjadi 3,67 kali dari KUK sekarang. Mampukah perbankan melakukannya?

Upaya peningkatan kredit UKM sebesar 3,67 kali dari sekarang tentu saja bukan kerja ringan bagi perbankan. Namun bila dilihat dari peluangnya, sebenarnya selain bank umum pembiayaan kredit UKM dapat dilakukan juga oleh lembaga keuangan mikro yang dapat berperan sebagai lembaga intermediasi seperti layaknya bank.

Menurut Bank Indonesia *Lembaga keuangan mikro* (LKM) terbagi atas BRI Unit, BPR, dan Badan kredit desa. Bank Indonesia hanya menyediakan data kredit yang dikeluarkan BPR (non-BPR syariah) sebesar 16.154 milyar rupiah. Nilai ini besarnya hanya 16 persen jika dibandingkan pengeluaran *kredit usaha kecil* bank umum atau hanya kurang dari 7 persen dari total investasi UKM. Dengan data yang ada terlihat bahwa peran BPR belum berperan baik dalam menyediakan dana yang diharapkan digunakan oleh UKM.

**Tabel 4**  
**Penyaluran kredit oleh BPR tahun 2006**

Pertanian	Perindustrian	Perdagangan, Restoran, rumah makan, dan Hotel	Jasa-jasa	Lain - lain	Jumlah
978	243	6.642	1.674	6.617	16.154

Sumber: Bank Indonesia

Dari data diatas terlihat bahwa sistem pembiayaan usaha kecil melalui LKM masih belum dikembangkan dengan baik. Mungkinkah LKM dikembangkan untuk membantu perbankan dalam meningkatkan investasi UKM menjadi 60 persen dari total investasi? Mungkinkah LKM memberikan andil dalam 3,56 kali lipat kredit yang harus disediakan lembaga-lembaga intermediasi (bank) agar investasi UKM menjadi 60

persen dari investasi keseluruhan? LKM sebagai lembaga yang menurut beberapa penelitian yang akan dibahas berikut dapat merupakan sumber pembiayaan yang cocok untuk pengembangan usaha kecil.

## **VI. LKM dan dana bagi usaha kecil**

Dalam banyak referensi yang penulis peroleh usaha mikro dan kecil mengalami kesulitan terhadap akses dana dari perbankan. UKM khususnya usaha kecil dan mikro masih menghadapi kesulitan dalam memperoleh dana dari sektor formal. Akibatnya sebagian besar dari mereka bergantung pada dana dari sektor informal. Lembaga keuangan non formal lebih banyak digunakan karena lembaga ini lebih fleksibel, misalnya dalam hal persyaratan dan jumlah pinjaman yang tidak seketat persyaratan lembaga perbankan khususnya dalam hal pencairan kredit, demikian menurut Wijono (2005).

Wijono (2005) dalam penelitiannya menyatakan untuk memberikan dana bagi usaha mikro dan kecil lebih baik dilakukan dengan pengembangan lembaga keuangan mikro pula, bukan dengan perbankan besar yang sudah ada. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan Aidin (2002) yang menyatakan keberhasilan *BPR LKP Rasanae Bima* dalam pembiayaan usaha mikro dan kecil di kecamatan Rasanae kabupaten Bima propinsi Nusa Tenggara Barat. Bahkan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Sandiaga S. Uno menyatakan perlunya pembentukan bank khusus untuk UKM (Koran Tempo, 2007).

Di negara tetangga, Malaysia, pembiayaan UKM dilakukan oleh bank khusus dibawah kementerian pembangunan usahawan dan koperasi. Hasilnya ternyata pembiayaan UKM di Malaysia terus naik 10 persen pertahun. (Koran Tempo, 2007). Simak juga lembaga keuangan AT-Taqwa sebagai lembaga keuangan yang dikelola Yayasan Masjid Attaqwa kawasan kemanggisan Jakarta (2001) yang berhasil menghimpun dana dan menyalurkan dana ke usaha mikro dan kecil dengan prinsip syariah. Dalam prakteknya yayasan melihat prospek usaha yang akan dibiayai, jika usaha tersebut memang memiliki prospek maka sekalipun tidak ada jaminan yayasan akan tetap bisa membiayai usaha kecil atau mikro tersebut. Mereka beranggapan bahwa masyarakat miskin yang ingin berusaha karena miskin tentu tidak punya sesuatu yang dijamin, jadi kalau harus minta jaminan kapan mereka bisa berusaha dan keluar dari kemiskinan. Tentu hal ini berbeda sekali dengan perbankan yang mengharuskan adanya jaminan bagi usaha yang akan mendapatkan kredit. Tentu saja sebelum menyalurkan dananya pihak yayasan Attaqwa meneliti dulu dengan meninjau langsung ke lokasi kelayakan usaha yang diajukan untuk dibiayai.

Untuk masalah pengembalian pihak yayasan Ataqwa lebih flirksibel. Usaha kecil dan mikro yang meminjam dana diperbolehkan memilih cara pengembalian dengan menyicil harian, mingguan atau bulanan, tergantung mana yang memudahkan peminjam. Dari bagi hasil yang diperoleh saat ini (2001) yayasan memperoleh bagi hasil bervariasi dari 13 persen, 15 persen, 20 persen, hingga 24 persen, tergantung keuntungan dari usaha kecil dan mikro yang dibiayai. Penggunaan lembaga keuangan mikro juga disarankan oleh Wijono (2005) untuk pembiayaan usaha kecil dan mikro. Menurutnya unit usaha mikro dan kecil belum menggunakan lembaga keuangan formal sehingga lembaga keuangan mikro dapat menjadi alternatif pengembangan usaha kecil dan mikro.

### **VIII. Kesimpulan**

Peran UKM dalam kontribusi terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja sangat besar sehingga tidak dapat dikesampingkan. Pengembangan UKM tentu memberikan kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.

Dalam investasi, investasi UKM masih tidak seimbang dibandingkan kontribusinya terhadap PDB. Sedangkan perbankan dengan KUK nya hanya bisa menyediakan sepertiga dari investasi yang dikeluarkan UKM. Di sisi lain *lembaga keuangan mikro* (LKM), yang menurut beberapa penelitian cocok untuk pembiayaan UKM penggunaannya dalam pembiayaan UKM masih kurang sekali digunakan. Seharusnya perbankan dan LKM dapat meningkatkan perannya dalam pembiayaan UKM.

### **Daftar Pustaka**

Aidin, *Peran Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan Dalam Meningkatkan Usaha Kecil, Kecamatan Rasanae Barat Kabupaten Bima*, Undergraduate thesis from JIPTUMM

Departemen Koperasi dan UKM

Kiryanto, Ryan, *Langkah terobosan mendorong ekspansi kredit*, Economic review, 2007.

Koran Tempo, beberapa edisi

Majalah Ekonomi dan Bisnis, beberapa edisi

Wijono, Wiloejo Wirjo, *Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Sebagai Salah Satu Pilar Sistem Keuangan Nasional: Upaya KONGKRIT Memutus Mata Rantai Kemiskinan*, Kajian Ekonomi dan Keuangan, Edisi Khusus, 2005.